

ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH 2010-2014

Intisari:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2010-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data APBD Kabupaten Banjarnegara. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan yang terdiri dari 1. rasio kemandirian keuangan, 2. rasio ketergantungan keuangan, 3. rasio derajat desentralisasi fiskal, 4. tingkat pencapaian target dan efisiensi PAD, 5. tingkat pencapaian target dan efisiensi pajak daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2010-2014 adalah: 1. Kemandirian keuangan termasuk rendah sekali dan pola hubungan daerah dengan pusat dan provinsi instruktif dengan rata-rata nilai kemandirian keuangan 8.99 persen, 2. Ketergantungan keuangan terhadap pusat dan provinsi termasuk sangat tinggi dengan rata-rata nilai ketergantungan keuangan adalah 91.77 persen, 3. Tingkat desentralisasi fiskal termasuk sangat kurang dengan nilai rata-rata tingkat desentralisasi fiskal adalah 8.22 persen, 4. Tingkat pencapaian target dan efisiensi PAD termasuk sangat efektif dan efisien, dengan nilai rata-rata tingkat pencapaian target PAD 114.82 persen dan nilai rata-rata efisiensi PAD 3.00 persen, 5. Tingkat pencapaian target dan efisiensi pajak daerah termasuk sangat efektif dan efisien, dengan nilai rata-rata tingkat pencapaian target pajak daerah 114.70 persen dan nilai rata-rata efisiensi pajak daerah 4.36 persen. Dari hasil analisis rasio keuangan Kabupaten Banjarnegara dapat disimpulkan bahwa secara umum Kabupaten Banjarnegara belum mampu menjalankan otonomi daerah secara menyeluruh karena tingkat kemandirian sangat rendah, tingkat ketergantungan sangat tinggi dan derajat desentralisasi fiskal sangat rendah tetapi sudah menunjukkan tren yang positif dalam pengelolaan keuangan dengan selalu efektif dan efisien dalam mengumpulkan PAD serta pajak daerah. Sebaiknya Kabupaten Banjarnegara lebih mengoptimalkan sumber potensi daerah untuk menggali lebih banyak pajak dan retribusi supaya mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi sehingga dapat menjalankan otonomi daerah secara menyeluruh dan mandiri.

Kata Kunci : Keuangan Daerah, Rasio Keuangan, Otonomi Daerah.